

**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemilihan Pilkades yang dilaksanakan tahun 2015 ini merupakan menjadi agenda penting Indonesia, setelah dilaksanakannya otonomi daerah, pemilihan kepala desa ini merupakan agenda yang telah tertera Undang-Undang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 dengan pokok bahasan tentang Pemilihan Kepala Desa, dalam hal ini telah tertera ketentuan umum yang harus dijalani dalam pemilihan kepala desa atas panitia Pilkades yang mana dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pilkades, dan calon kepala desa adalah bakal calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala Desa.

Dan pemilihan kepala desa ini dilaksanakan secara serentak ataupun bergelombang. Karena pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sempat tertunda karena pemilihan legislatif dan pemilihan eksekutif maka Pilkades diundur ditahun 2015 ini, dan semua peraturan pelaksanaan Pilkades ini telah tertera sesuai undang undang no 6 tahun 2013 dan Peraturan Pemerintahan (PP) no 43 tahun 2014.

Pemilihan kepala desa atau klebun sebutan dalam masyarakat Madura ini merupakan termasuk peristiwa politik dan termasuk peristiwa kultural oleh masyarakat Madura, dan pemilihan klebun ini bukan hanya upaya seseorang mendapatkan kekuasaan akan tetapi khususnya di Madura

pemilihan kepala desa merupakan pengukuhan status sosial yang sangat dekat dengan kehormatan, harga diri, keluarga karena tidak semua dan sembarang orang mencalonkan diri untuk pemilihan kepala desa. Karena diantaranya harus memiliki kemampuan personal, memiliki ikatan kekerabatan Blater, kekayaan serta memiliki dan berhubungan langsung dengan jaringan keblateran.yang mana tidak jauh dengan adat Madura remoh dan Sandor.

Dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa di Banjar Galis Madura ini yang melibatkan peran dan kebijakan elite *blater* ini disetiap pilkades, *Blater* yang mana merupakan elite desa Madura memberikan pengaruh dalam setiap kebijakan, penyelesaian permasalahan ataupun kontestasi pemilihan kepala desa. Dalam daerah ini peran dan kebijakan elite sangatlah menjadi pedoman utama. Karena faktor kebudayaan dan sejarah elite *blater* sampai saat ini daerah Banjar Madura masih menggunakan kebijakan dan keputusan blater dalam setiap agenda di Madura.

Adat istiadat Madura yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Madura dalam kehidupan keseharian masyarakat Indonesia. Dalam hal ini para *Blater* se Madura memiliki adat perkumpulan khusus yaitu Remoh dan Shandor yang mana merupakan wadah berkumpulnya golongan *Blater* dan elite Madura *Klebun* juga, klebun disini kepala desa, klebun merupakan pilihan blater dan bahkan banyak sampai hampir diseluruh madura bahwa yang memilih dan menjadi Klebun itu adalah para *Blater* . Adat ini merupakan pengikat silaturahmi yang berbentuk arisan bahkan nilainya

terlalu tinggi, dan dalam acara ini ada tarian remoh yang yang dijadikan tarian identitas para blater dan klebun Madura. Bahkan berkumpulnya blater dalam adat remoh dan shandor ini terkadang menjadi sebuah wadah dan cara untuk seseorang yang mencalonkan diri sebagai kepala desa, bahkan menjadi strategi untuk kemenangan dan pencalonan kepala desa yang akan dilaksanakan pilkades besok. Karena *blater* disini bukan hanya menunjuk kontestasi kepala desa bahkan blater memiliki peran penting dalam pembangunan serta pengelolaan kekayaan desa.

Blater merupakan elite pedesaan desa yang memiliki social origin dan tradisi, blater dibesarkan atas unsur jagoanisme, dulu dekat dengan kekerasan dan tidak jauh dari istilah adat shandor, remoh dan kerapan sapi, dan istilah ini terkenal di Bangkalan dan Sampang. Jika di Sumenep dan Pamekasan terkenal dengan *bajingan*. Namun blater perandai saat ini bisa dikatakan sudah naik tingkatan sosial yang mana dalam image memiliki identitas sosial yang lebih tinggi dari masyarakat lainnya dan perandai memiliki moral serta peradaban yang lebih tinggi.

Tokoh masyarakat atau *blater* yang memihak secara penuh bahkan memberikan dana untuk kebutuhan salah satu calon kepala desa Banjar Tanah Merah Madura. Pemilihan kepala desa yang diadakan bulan Juni 2015, menarik untuk diteliti. Mulanya salah satu calon kepala desa pernah menjabat sebagai kepala desa akan tetapi berhenti ditengah masa jabatannya dikarenakan beberapa hal yang mengakibatkan masyarakat menginginkan untuk turun. Dan diganti untuk sisa periodenya dan

penggantinyaapun demikian tidak selesai untuk sisa jabatannya dikarenakan meninggal dunia, yang mana jabatan kepala desa Banjar dialihkan ke PJS yang mana ditentukan dan diduduki pegawai negeri kecamatan setempat.

Dan akhirnya dalam periode 2015-2020 pemilihan kepala desa dimenangkan telak oleh salahsatu calon kepala yang pernah berhenti ditengah masa jabatannya . Dengan kemenangan telak ini tidak lepas dari peran Elite blater banjar, salah satu tokoh masyarakat Banjar yang memihak secara penuh untuk menjabat kembali kepala desa, masyarakat awalnya hanya melihat kepada Blater atas tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh besar sehingga banyak dari masyarakat setempat memilihnya. Masyarakat berpendapat dan meilihat sosok Blater atas dasar keberadaan dan tanggung jawab beberapa Blater, mereka berpandangan mungkin adanya perubahan jika Blater yang memegang penuh dan bertanggung jawab atas calon kepala desa akan berbeda dengan pemerintahannya terdahulu.

Adat istiadat madura atas keberadaan Blater yang merupakan elite pedesaan memiliki sifat origin dan tradisi yang tinggi, keharuman nama ingin tetap memiliki image dan kewibawaan oleh masyarakat, dan Blater memegang peranan Moral serta peradaban yang tinggi. Para Blater tetap menginginkan kehormatan dan ingin selalu disegani oleh masyarakat setempat. Beberapa tujuan yang diketahui tujuan Blater memberikan dukungan penuh dalam bentuk memberi bantuan moril dan banyak materil.

Dengan pengaruh kuatnya elite lokal Blater dalam kehidupan sosial politik masyarakat Banjar Madura menjadikan kekuatan elite itu

mempengaruhi kontestasi dan jalannya kehidupan sosial politik. Maka dengan fakta dan fenomena tersebut penelitian tertarik untuk mengetahui **pengaruh Elite Politik Dalam Kontestasi di Desa dengan menggunakan studi Peran Blater dalam Pilkades di desa Banjar, Galis, Bangkalan Madura ).**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari fenomena-fenomena yang telah dijelaskan diatas maka timbul pertanyaan yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana struktur elite politik di desa Banjar kecamatan Galis Madura ?
2. Bagaimana peran elite blater dalam kontestasi pemilihan kepala desa di desa Banjar ?
3. Apa kepentingan elit blater dalam mendukung dan mencalonkan calon kepala desa?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Dari fenomena di atas peneliti akan menulis beberapa tujuan dari penelitian tentang Elite Politik Dalam Kontestasi di Desa ( Studi Peran Blater dalam Pilkades di desa Banjar, Galis Bangkalan Madura ).

1. Untuk mengetahui struktur elite politik di desa Banjar kecamatan Galis Madura.

2. Untuk mengetahui peran elite blater dalam kontestasi pemilihan kepala desa di desa Banjar.
3. Untuk mendeskripsikan tentang kepentingan elit blater dalam mendukung dan mencalonkan calon kepala desa

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat antara lain:

1. Memperkuat studi elite politik khususnya elite desa.
2. Memperoleh pengetahuan tentang kuatnya pengaruh elite desa pada setiap kebijakan dan proses sosial politik di wilayahnya, serta mengetahui tatanan serta sejarah politik elite desa.

#### **1.5 Kerangka Teori**

##### **1.5.1 Teori Elite Politik**

Elite menurut Suzzana Keller berasal dari kata *elligere*, yang berarti memilih, dalam perkataan biasa kata itu berarti bagian yang menjadi pilihan atau bunga suatu bangsa, budaya, kelompok usia dan juga orang-orang yang menduduki posisi yang tinggi. Dalam arti umum elite menunjuk pada sekelompok orang dalam masyarakat yang menempati kedudukan-kedudukan tertinggi. Dengan kata lain elite adalah kelompok warga masyarakat yang memiliki kelebihan

dari pada warga masyarakat lainnya sehingga menempati kekuasaan sosial diatas warga masyarakat lainnya.<sup>1</sup>

Perbedaan yang tidak mungkin terletakkan diantara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dinyatakan sebagai titik awal bagi munculnya kelompok-kelompok yang mempunyai keunggulan apabila dibandingkan dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya dalam masyarakat yang sama. Anggota masyarakat yang memiliki keunggulan tersebut pada gilirannya akan tergabung dalam suatu kelompok yang dikenal dengan sebutan kelompok elite. Keunggulan yang melekat pada dirinya akan menggiring mereka tergabung dalam kelompok elite. Yang memiliki perbedaan dengan anggota masyarakat kebanyakan lainnya yang tidak memiliki keunggulan. Sebutan elite atau terminologi elite, sebagaimana diungkapkan oleh Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca, Suzzana Keller dan pemikir yang tergolong elite theoris, memang menunjukkan pada kelompok atau golongan yang ada disuatu masyarakat yang memiliki keunggulan atau superioritas apabila dibandingkan dengan kelompok atau golongan lainnya.<sup>2</sup>

Elite itu merupakan bagian golongan minoritas dan golongan ini mewakili untuk melakukan tujuan sosial untuk melanjutkan suatu tatanan sosial. Dan golongan elite ini ada karena ada timbul awalnya

---

<sup>1</sup> Suzanne Keller, *Penguasa dan Kelompok Elit, Peranan Elit Penentu dalam Masyarakat Modern*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1995), hal, 33

<sup>2</sup> Hariyanto, *Kekuasaan Elit; Suatu Bahasan Pengantar*, PLOD-JIP-FISIPOL UGM: Yogyakarta, 2015. Hal 66.

dari solidaritas organis dalam arti bahwa kekuasaan umum atau ruling elite yang mana tidak dapat berhubungan langsung dengan tiap anggota masyarakat secara individu dan akan tetapi perlu berkomunikasi dengan organ dalam masyarakat, yaitu dalam hal ini pusat kekuasaan atau strategic elite oleh Suzzane Keller. Tumbuhnya beberapa kelas dalam masyarakat yang awalnya lahir dari sejarah yaitu dari kelas kasta sampai kelas kepentingan atas kompleksitas macam pekerjaan masyarakat saat ini, Dan kelas penentu itu lahir dari dorongan dan elite tidak jauh dengan sejarah sebagai alternatif struktural dari kelas penguasa dan kasta penguasa yang mewakili suatu bentuk kepemimpinan yang lebih berspesifikasi dan maju.

Asumsi teori elite bahwasnya dalam setiap masyarakat terbagi dalam dua kategori : 1. Sekelompok kecil manusia yang memiliki kemampuan dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah dan mereka disebut : (a). Elite yang berkuasa (b). Elite yang tidak berkuasa. 2. Sejumlah massa yang ditakdirkan untuk diperintah. Elite yang berkuasa jumlahnya relatif sedikit, mereka memiliki kemampuan dan kelebihan untuk memanfaatkan kekuasaan, mereka memegang semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan sehingga dengan mudah memanfaatkannya dengan mudah memanfaatkan untuk tujuan yang baik misalnya : kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendidikan, perluasan kesempatan kerja , peningkatan derajat kesejahteraan dan lain-lain, tetapi kekuasaanya itu bisa



digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak baik, misalnya : memperkaya diri sendiri, memperkuat posisi oligarki, memasukkan klan dan keluarganya dalam pemerintah, menggalang kekuatan untuk memberantas oposisi dan lain-lain. Disamping itu juga terdapat elite yang tidak berkuasa, mereka menjadi lapis kedua dalam strata kekuasaan elite. Lapisan elite ini akan menjadi pengganti elite di atasnya jika sewaktu-waktu elite pemegang kekuasaan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan pemerintahan, elite ini juga menjadi tandingan apabila elite yang berkuasa tidak mampu menjalankan tugas mengendalikan kekuasaan.<sup>3</sup>

Suzanne Keller menambahkan terdapat empat proses sosial utama yang mendorong perkembangan elite yakni: 1. Pertumbuhan penduduk 2. Pertumbuhan spesialisasi jabatan 3. Pertumbuhan organisasi formal atau birokrasi, 4. Perkembangan keagamaan moral. Konsekuensinya, kaum elite pun semakin beragam, dan lebih bersifat otonom.<sup>4</sup>

### **Elite penentu**

Elite-elite penentu adalah suatu kristalisasi, suatu perkembangan lebih lanjut dari kelas-kelas penguasa, jadi mereka dapat dianggap sebagai setaraf dalam fungsinya tetapi sebagai alternatif-alternatif struktural dari kelas-kelas penguasa dan kasta-kasta penguasa, yang

---

<sup>3</sup> Sp Varma, Teori Politik Modern, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001). Hal.197

<sup>4</sup> Op cit, Suzane Keller, hal. 87

mewakili suatu bentuk kepemimpinan sosial yang lebih berspesialisasi dan lebih maju.

Suzanne Keller membagi tipe kepemimpinan sosial dapat dibagi menjadi 4 :

1. Kasta penguasa

Membina orang melalui reproduksi biologis dan dengan prestise yang tinggi. Kasta penguasa terbentuk terpisah dengan agama, kekerabatan, bahasa, daerah tempat tinggal, kedudukan ekonomi serta aktivitas jabatan. Didapatkan dari kelahiran dan meninggalkan dengan kematian.

2. Aristokrasi

Terbentuk melalui ikatan keluarga melalui kekerabatan dan kekayaan, aristokrasi menyukai jabatan politik dan perang.

3. Estate pertama

Dapat didapatkan melalui pelaksanaan, pembuatan, oengangkatan dan perkawinan jadi status bisa hilang.

4. Elite-elite penentu

Elite ini spesialis istimewa, seleksi atas dasar kompetensi perseorangan mencangkup menyingkirkan yang tidak kompeten, dan prinsip ini menghubungkan elite modern dengan lembaga kepimimpinan primitif termasuk kepala desa, pendeta, raja, ataupun prajurit. Elite penentu memiliki keistimewaan dalam segala hal atau keunggulan semua segi.

Elite penentu sering menghubungkan dengan masyarakat, elite-elite lainnya bahkan susah untuk menjangkau dan menyelesaikan permasalahan karena tertutupnya misalkan kasta. Kebangkitan kelompok-kelompok inti masyarakat dan kelas-kelas sosial.

Asal-usul elite penentu sebagaimana terdapat pada keadaan semua kelompok-kelompok berkuasa yang mana ada pada masyarakat heterogen dalam segi usia, jenis kelamin, kekuatan, kesukupan, ras dan asal usul kelas sosial terletak dalam pembagian kerja masyarakat. Perbedaan masyarakat modern atau masyarakat industri dengan masyarakat modern yang lebih maju dalam teknologi dan kerja, dan dengan diferensiasi internal itu menimbulkan elite-elite penentu

### **Fungsi elite penentu**

Elite melakukan fungsi sosial yang dalam pandangannya fungsi keterwakilan, akan tetapi dalam buku suzzane keller juga mewakili tautologi yang mana fungsi menguasai masyarakat atau elite merupakan kelompok yang unggul dengan status dan kekuasaan. Secara fungsional masyarakat perlu adanya kepemimpinan dan elite tidak pernah dapat bertindak semata-mata sesuai dengan fungsional status mereka, ketidak sempurnaan moral dan kepribadian manusia serta godaan lingkungan dan juga sifat struktur sosial dan hal ini sudah menjadi kenyataan sosiologis dan para pemimpin juga seperti

orang biasa tidak menjalankan satu melainkan banyak peranan sosial. Dan mereka yang melaksanakan fungsi atas nama politik atau ekonomi harus membagi sektor terhadap peranan lainnya yang sebagai konsumen. Mereka disamping melakukan orientasi fungsional mereka dan jarang akan melakukan orientasi semacam itu saja. Penguasa dan Kelompok elite.<sup>5</sup>

Dengan mempergunakan model sistem sosial yang dikembangkan oleh Talcott Parsons, empat macam elite berkenaan dengan fungsi khusus :

- Elite dalam hubungan pencapaian tujuan elite ini menata usaha-usaha untuk mencapai tujuan sosial secara umum
- Elite adaptasi yang mana elite ini mengembangkan alat untuk mencapai tujuan.
- Elite integratif merupakan elite yang menyalurkan ukuran-ukuran moral yang bersifat umum serta keyakinan
- Elite yang mempertahankan pola yang mana elite yang mencerminkan moral umum dari anggota masyarakat.<sup>6</sup>

Elite penentu juga dibedakan menurut kecenderungan apakah mereka terutama memperhatikan problema internal dan eksternal bagi sistem sosial yang bersangkutan. Elite integratif dan elite yang mempertahankan pola sosial tertentu digambarkan sebagai

---

<sup>5</sup> Opo cit, Suzanne Keller, hal. 32

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 378

memusatkan perhatian pada problema internal yang menyangkut tingkah laku moral dan aspirasi individual. Sedangkan elite pencapai tujuan dan adaptif dilihat sebagai memperhatikan problema eksternal seperti hubungan dengan dunia luar dan rencana untuk masa depan. Elite yang terakhir ini cenderung untuk menekankan aspek-aspek instrumental dari tanggung jawab mereka dan sangat terorganisasi. Sedangkan elite integratif dan elite penahan pola cenderung untuk menekankan aspek-aspek simbolik dan lebih bercabang serta individualistis orientasinya.<sup>7</sup>

#### **Tujuan dan tanggung jawab elite**

Berhubungan dengan pengadaan, tanggung jawab, dan imbalan jasa elite. Elite pencapai tujuan biasanya dipilih, elite adaptasi umumnya diangkat, elite yang mempertahankan pola dipilih berdasarkan kesukaan orang banyak, elite integratif tidak mengikuti pola tertentu.<sup>8</sup>

Masalah mengenai bertahannya elite penentu dan dampaknya terhadap kontinuitas sosial. Di nilai dari segi tertentu, tentunya elite tidak akan pernah mati secara menyeluruh, oleh karena itu mereka hidup dalam ingatan orang-orang dan bangsa-bangsa dan dalam hal ini bertahan secara simbolik memperlihatkan keabadian tertentu.

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hal. 378

<sup>8</sup>*Ibid.*, hal. 380

## 1.6 Konseptualisasi

### 1.6.1 Pengertian Elite Politik

Menurut Laswell elite politik mencakup semua pemegang kekuasaan dalam suatu bangunan politik. Elite ini terdiri dari mereka yang berhasil mencapai kedudukan dominant dalam sistem politik dan kehidupan masyarakat. Mereka memiliki kekuasaan, kekayaan dan kehormatan.

Menurut Mills elite adalah mereka yang menduduki posisi komando pada pranata utama dalam masyarakat. Dengan kedudukan tersebut para elite mengambil keputusan keputusan yang membawa akibat yang dirasakan oleh seluruh lapisan Masyarakat.

Menurut Gaetano Mosca dalam setiap masyarakat terdapat dua kelas penduduk, satu kelas yang menguasai dan satu kelas yang dikuasai. Kelas penguasa jumlahnya lebih kecil, menjalankan semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan yang diberikan oleh kekuasaan itu. Sedangkan kelas yang kedua jumlahnya lebih besar dan dikendalikan oleh kelas penguasa.

Menurut Vilfredo Pareto, setiap masyarakat selalu terbagi kedalam dua golongan atau kelas, elite dan kelas massa, jumlah yang sangat sedikit dan massa yaitu yang dikuasai. Didalam suatu masyarakat hanya elite, kelompok pemimpin dan massa yang hanya mengikuti. Para elite adalah individu atau kelompok yang memiliki kualitas-kualitas yang diperlukan yang mendukung kehadiran mereka

pada kekuasaan sosial dan politik yang penuh. Elite merupakan individu yang mampu menduduki lapisan tertinggi masyarakat. Pareto membagi elite dibedakan menjadi governing elite dan non governing elite. Menurut Pareto mengembangkan konsep yang membedakan tingkah laku individu logis dan non logis. Menurut Pareto manusia bukanlah bertindak karena mereka berfikir melainkan mereka berfikir karena mereka bertindak.<sup>9</sup>

#### 1.6.2 Kontestasi

Kontestasi berasal dari kata dasar Kontest. Dalam KBBI (Kamus besar Bahasa Indonesia) disebutkan sebagai kata benda, yaitu perlombaan. Kamus Oxford 2005 menyebutkan makna Contest sebagai kata benda yang artinya *An event in which people compete*. Apabila diterjemahkan suatu ajang / perlombaan di mana terjadi adu kekuatan atau keunggulan.<sup>9</sup>

“*Contestation*” dalam kamus dijelaskan sebagai *noun* dari kata kerja *to contest* dan maknanya adalah “bertikai, berpolemik, berdebat” (*to dispute*), misalnya pada frasa *to contest the will* (bertikai secara hukum mengenai hak waris). Jadi “kontestasi” bukan menyiratkan “persaingan/pertarungan antara kontestan pemilu” sebagai yang kita sangkakan, melainkan “perseteruan, sengketa atau pertikaian”. Pada salah satu referensi definisi dari *contestation* diberikan sinonim (persamaan kata) antara lain *disagreement*, *controversy*, *debate*,

---

<sup>9</sup> Nawangga Soni Pratama SIP, Tesis “kontestasi antar elite desa dalam implementasi visi desa agrowisata segorogung, kab Karanganyar, Jawa Tengah”

*dispute, dissension*. Dan bisa dilihat disini bahwa “kontestasi” sama sekali tak ada kaitannya dengan kontes dari kandidat presiden atau anggota legislatif.<sup>10</sup>

Dapat diketahui bahwasanya kontestasi merupakan ajang atau perlombaan dan persaingan dimana ada beberapa pihak untuk adu kekuatan dan keunggulan yang mana dapat menimbulkan konflik antar pihak yang berseteru.

Kontestasi terjadi saat situasi ketidaksepakatan atau pertentangan muncul. Setiap isu mengandung tiga hal yakni segi potensi, segi kontestasi dan segi akseptasi. Potensi suatu isi mengandung pengertian ada segi-segi yang memicu semua pertanyaan vital oleh mereka yang pro dan mereka yang kontra. Sisi ini memperlihatkan lingkup dan kualitas masalah-maslah yang dipersoalkan.

Kontestasi mengandung pengertian bahwa ada pihak-pihak yang bertentangan sehingga menimbulkan : *clash of argument*. Di dalam lingkup ini ada pertukaran yang saling bersaing terhadap nilai, fakta dan kebijakan terhadap dan sumber masalah yang memotivasi tindakan-tindakan. Sementara akseptasi mengandung pengertian bahwa ada berbagai pihak atau dua sisi yang menerima sisi-sisi yang disepakati atau disetujui (vancil,1993:70).

---

<sup>10</sup> [m.kompasiana.com/gustaafkusno/istilah-kontestasi-yang-ngawur](http://m.kompasiana.com/gustaafkusno/istilah-kontestasi-yang-ngawur)



Kontestasi memperlihatkan masalah-masalah dari berbagai perspektif yang berbeda, saling bersaing; Pertama, apakah setiap aktor menggunakan kata untuk pengertian yang sama dan apa saja yang ada didalam pemikiran mereka ( Vancil, 1993 :70). Kedua, mencangkup siapa-siapa yang pro dan siapa-siapa yang kontra (agents). Ketiga, melakukan identifikasi terhadap sebab-sebab kontroversi yang berguna untuk memperdalam dan mempertajam motif-motif. Keempat, mencermati tentang karakteristik dan sejarah keyakinan dan kebijakan yang ada sekaligus mempertimbangkan nilai dan kebijakan yang seperti apa yang ditawarkan didalam kontestasi tersebut.

Dalam kontestasi ada empat hal yang penting yang merupakan ciri pokoknya. Pertama apakah setiap aktor politik (agent) menggunakan istilah reformasi untuk pengertian yang sama dan apa saja yang ada didalam pemikiran mereka tentang kontroversi tersebut yang berhubungan dengan reformasi. Kedua, kontestasi dapat dicermati dari pihak-pihak yang pro dan pihak-pihak yang kontra. Ketiga, kontestasi makna reformasi sendiri dapat dicermati terhadap sebab-sebab kontroversi yang berguna untuk mendalami dan mempertajam moti-motif dari isu-isu yang menjadi sumber kontroversi. Keempat, kontestasi dapat dicermati dari karakteristik

dan sejarah keyakinan serta kebijakan masa lalu yang sedang berlangsung.<sup>11</sup>

### 1.6.3. Pemilihan kepala desa

Pemilihan kepala desa ini diadakan 5 tahun sekali dan pemilihan kepala desa ini dapat diikuti masyarakat desa, dalam hal ini Pemilihan kepala desa selain untuk jalannya birokrasi desa juga bisa dikatakan sebagai bentuk demokrasi dalam wilayah lokal, pemilihan kepala desa merupakan bentuk demokrasi lokal dan bentuk agenda otonomi daerah. Agenda yang sangat penting oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala desa diterbitkan untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2014 Tentang desa yang menyebutkan perlunya penetapan Permendagri tentang Pemilihan Kepala Desa. Dalam Permendagri 112/2014 ini terdiri dari 50 pasal dan 7 BAB diantaranya : Ketentuan umum, Pemilihan kepala desa, Pelaksanaan, Pencalonan, Kepala desa, Perangkat Desa dan Pegawai Negeri Sipil sebagai calon Kepala desa, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain dan Penutup.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Basuki Agus Suparno kontestasi makna dan dramatisme komunikasi politik tentang reformasi di indonesia

<sup>12</sup> Hukum.bantulkab.go.id

## 1.7 Metode Penelitian

### 1.7.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk pencarian fakta mengenai kejadian atau peristiwa yang terjadi pada saat penelitian dengan interpretasi yang tepat, mempelajari masalah-masalah, serta situasi tertentu, termasuk hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.<sup>13</sup>

### 1.7.2 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah blater desa Pangolongan yang merupakan elite lokal desa Banjar Madura yang berpengaruh dalam kontestasi Pilkades di desa Banjar Kecamatan Galis Madura.

### 1.7.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu pada kekuatan elite lokal (Blater) dalam mempengaruhi kontestasi Pilkades di desa Galis Kecamatan Bangkalan Madura.

### 1.7.4 Subyek Penelitian

Penelitian ini tertuju kepada Blater desa Banjar Madura yang mana memiliki pengaruh besar dalam kontestasi didesa. Bentuk pengaruh elite dalam kontestasi calon dari Pilkades 2015 dan melihat

---

<sup>13</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal.5

bentuk tatanan adat istiadat yang membentuk elite lokal (blater) ini yang mana peneliti akan meneliti bagaimana kekuatan elite politik dalam mempengaruhi kontestasi Pemilihan Kepala Desa. Dalam penelitian ini diperlukan adanya subjek penelitian, subjek penelitian ini adalah informan. Informan merupakan narasumber yang dapat memberikan sebuah informasi dan penjelasan-penjelasan yang diperlukan peneliti dalam proses penelitian.

Informan dalam penelitian ini ditentukan oleh peneliti, alasan peneliti menentukan informannya karena informan tersebut dianggap akan mampu memberikan segala informasi yang di butuhkan peneliti. Informan yang dipilih juga merupakan informan yang mengetahui dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan oleh peneliti.

Dalam penelitian ini ada Informan utama yang sangat membantu dalam memberikan informasi yaitu :

1. Ahmad Faisol panitia pilkades desa setempat dan dianggap penting untuk dijadikan informan karena mengetahui jalannya proses pilkades baik saat pilkades berlangsung maupun saat masa kampanye dan yang paling penting informan ini tidak berpihak kepada salah satu calon kepala desa.
2. M. Ripin yaitu kepala desa Galis Madura periode 2015-2020 informan ini dipilih karena mengetahui keadaan desa Banjar dan mengetahui semua prosesperan yang dilakukan blater saat menjadi tim sukses sebelum pilkades dan sesudah pilkades ,

3. H. Muhajir sebagai salah satu blater utama dipilih oleh peneliti karena dapat memberikan informasi atas peran dan kegiatan apa saja yang dikerjakan daat kontestasi didesa.
4. H. Mubin merupakan blater desa yang mengetahui pula proses pilkades di desa Banjar.
5. Ibu Iis yang merupakan masyarakat desa Banjar, peneliti memilih informan ini dikarenakan untuk mrwakili masyarakat desa Banajr.
6. Kemudian H.Topik kepala desa, desa tetangga desa Banjar desa Sadeh yang mana dipilih oleh peneliti untuk mendapatkan informasi akan perihal blater

#### 1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk keperluan analisis data, maka penulis memerlukan sejumlah data pendukung yang berasal dari luar dan dalam. Penulis menggunakan dua macam pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

##### 1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antar periset dan responden, di mana jawaban responded akan menjadi data mentah. Menurut steward “Secara khusus, wawancara adalah alat yang baik untuk menghidupkan topik riset. Wawancara juga merupakan metode bagus untuk pengumpulan data tentang subjek kontemporer yang belum dikaji secara ekstensif dan tidak banyak literatur yang membahasnya.”

Dan tipe wawancara itu ada tiga standar, semi standar, dan tidak terstandarisasi. Tidak terstandarisasi ini bisa dikatakan tidak terstruktur, yang mana dapat mengimplikasikan bawa daftar pertanyaan itu muncul begitu saja tanpa ada perencanaan, istilahnya natural.<sup>14</sup>

## 2. Studi dokumentasi

Data yang dihasilkan dari wawancara terkadang tidak cukup, maka peneliti perlu melakukan studi dokumentasi untuk melengkapi data penelitian. Teknik studi dokumentasi ini bertujuan untuk menggali data non-insani, misalnya buku pedoman, catatan, surat-surat keputusan, laporan kegiatan dan sebagainya.

### 1.7.6 Jenis Data

Di dalam jenis data ini, terdapat dua jenis data yang di dapat oleh peneliti, yang pertama adalah data-data utama atau primer serta data sekunder sebagai data sampingan untuk lebih melengkapi data primer dalam penelitian ini.

#### 1. Data primer

Data primer yang biasa disebut sebagai data utama dari setiap penelitian ini didapat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan tema penelitian. Peneliti terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan pokok utama yang

---

<sup>14</sup> Lisa Horrison, *Metodologi Penelitian Politik*, (Jakarta: Kencana Pernada Group,2007), hal 104.

nantinya akan ditanyakan kepada informan. Pertanyaan yang ditanyakan kepada informan untuk mendapatkan data utama sebaiknya diatur secara berurutan agar informan mudah dalam menjelaskan permasalahan yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Informan yang peneliti wawancara dalam penelitian ini adalah M. Ripin (Kepala desa Banjar, Galis Madura sekarang), Amad Faisol (Panitia penyelenggaraan Pilkades desa Banjar 2015), H. Mustofa Moebin (Salah satu Blater aktif dan aktif pelaksana Shandor dan Remoh Tahunan), H. Muhajir (Blater Pangolongan), H. Topik ( Tokoh dari luar desa Banjar) dan Masyarakat Banjar, Galis Madura.

## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapat untuk mendukung data-data primer. Data sekunder di dapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari buku harian, notulen rapat perkumpulan, dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Data sekunder juga dapat berupa koran harian, majalah, publikasi dari berbagai organisasi, lampiran-lampiran dari badan-badan resmi seperti kementrian-kementrian, skripsi terdahulu, tesis, hasil survey, studi histories, dan sebagainya.

### 1.7.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Alasan penggunaan metode kualitatif:<sup>15</sup>

Pertama, memiliki peluang lebih besar untuk mengeksplorasi keyakinan dan sikap responden. Kedua, metode ini dapat menjelaskan “mengapa” dan “bagaimana” bukan sekedar “apa”. Ketiga lebih mengandalkan pada tindakan dan pikiran responden.

Teknik analisis data ini bertujuan untuk menyusun data agar tersusun rapi, dimana di mulai dari wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait serta kumpulan bahan-bahan yang didapat untuk menunjang penelitian. Selain itu data-data primer dan data sekunder yang di dapat peneliti juga akan menunjang dalam menganalisis data.

Proses analisis data ini dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan:<sup>16</sup>

1. Reduksi data atau penyederhanaan data, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.
2. Paparan data, menyusun data dalam satu kesatuan.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal 92.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 10



3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu kegiatan menyimpulkan makna-makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya.

Dalam proses menganalisis data yang dilakukan pertama kali adalah mentranskrip hasil wawancara dan ditata dengan baik sesuai urutan-urutan pertanyaan permasalahan dalam penelitian. Setelah itu dilakukan pemetaan dan penyederhanaan data, kemudian dilakukan penyusunan data agar tersusun rapi. Langkah selanjutnya adalah menganalisis hasil temuan data dengan menghubungkan teori yang relevan, setelah itu mulai menyusun suatu kesimpulan.

